

# Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Mandiri

Zuli Kasmawanto

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Darul 'Ulum

zulikasmawanto@unisda.ac.id

Received: 04 Februari 2025; Revised: 20 Maret 2025; Accepted: 01 April 2025; Published: Agustus 2025; Available online: Agustus 2025

### *Abstract*

*This research is based on the low level of community participation and independence in village development, which is a major obstacle in creating an empowered and sustainable village. This research aims to analyze the village government's strategy in empowering the community through the implementation of the Independent Village Program, with a case study in Pucangro Village. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the village government's strategy includes the implementation of skills training, strengthening MSMEs, developing BUMDes, and involving the community in program planning and implementation. The program provides positive impacts on the economic, social, and participatory aspects of the community. However, several obstacles are still encountered, such as limited human resources, low participation of some residents, as well as regulatory challenges and local culture. This research recommends the need to strengthen collaboration across sectors and increase the capacity of village institutions to encourage the sustainability of empowerment programs. The findings are expected to be a reference for policy makers and future researchers in developing community-based development strategies.*

**Keywords:** *Village Government Strategy, Community Empowerment, Independent Village*

## **Pendahuluan**

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemerataan pembangunan nasional di Indonesia. Namun, hingga kini masih ditemukan berbagai persoalan mendasar yang menghambat percepatan pembangunan desa, terutama terkait rendahnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal mereka. Banyak desa masih bergantung pada intervensi eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga masyarakat kurang ter dorong untuk berinisiatif dan berinovasi secara mandiri. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya desa yang mandiri dan berdaya saing (Yustiyanto, 2025)

Salah satu hambatan paling nyata adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Masyarakat seringkali hanya menjadi objek dalam pelaksanaan program-program yang digagas pemerintah desa, tanpa dilibatkan secara aktif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Menurut Widianingsih, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa masih bersifat

formalitas dan tidak menyentuh substansi partisipasi yang sejati, seperti menyampaikan aspirasi, kritik, atau gagasan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesadaran politik lokal, serta kurangnya ruang dialog antara pemerintah desa dan warganya. (Marlaba & Khaddafi, 2024)

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hal ini menjadikan desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kerangka ini, pemerintah desa memiliki peran sentral sebagai penggerak pembangunan yang adaptif dan partisipatif, sekaligus sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat (PDTT, 2021).

Peran strategis ini juga tampak dalam bagaimana pemerintah desa mengelola Dana Desa dan merancang program pemberdayaan. Hasil observasi

yang dilakukan di Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai menunjukkan kesadaran pentingnya membangun kemandirian masyarakat melalui berbagai program berbasis potensi lokal, seperti pelatihan UMKM, pembinaan kelompok tani, dan kegiatan pemuda. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala desa dan partisipasi warga. Menurut Iswandi, efektivitas program desa sangat ditentukan oleh sejauh mana kepala desa mampu membangun komunikasi yang baik dan menyusun strategi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Iswandi, 2020).

Di Desa Pucangro, pemerintah desa telah melakukan berbagai inovasi, seperti pengembangan sistem informasi desa dan pelibatan tokoh masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa. Akan tetapi, masih ditemukan tantangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat yang cenderung pasif dan masih menunggu arahan dari perangkat desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang baik (good governance) belum sepenuhnya terwujud. Sutoro Eko menyatakan bahwa

keberhasilan pembangunan desa mandiri sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah desa menciptakan sistem pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Eko et al., 2014).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Desa Pucangro untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti akademisi atau LSM. Berdasarkan pengamatan lapangan, program-program yang bersifat top-down perlu diimbangi dengan pendekatan partisipatif agar masyarakat merasa memiliki dan terdorong untuk berkontribusi. Sejalan dengan pendapat Wulandari & Suryono, pemerintah desa yang memiliki visi dan strategi yang jelas akan lebih mudah dalam membangun sinergi dengan warganya untuk mewujudkan kemandirian desa secara berkelanjutan (Wulandari, D., & Suryono, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pemerintah Desa Pucangro dalam mewujudkan desa mandiri melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang digunakan oleh

pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi serta kemandirian masyarakat di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi program-program yang telah dijalankan, termasuk mengungkap faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah desa, guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan kajian sebelumnya (*research gap*) terkait peran pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri, khususnya dalam konteks lokal seperti yang terjadi di Desa Pucangro. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum mengkaji secara mendalam praktik-praktik strategis pemerintah desa dalam mengelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, fokus kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada capaian pembangunan fisik, sementara aspek kemandirian sosial, ekonomi, dan penguatan kelembagaan desa belum

mendapat perhatian yang memadai. Penelitian ini juga merespons kurangnya integrasi antara analisis kepemimpinan desa, strategi kebijakan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam satu kerangka kajian yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan dalam memperkaya literatur pembangunan desa berbasis lokalitas dan pemberdayaan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang memiliki potensi, kekuatan, dan kapasitas untuk berkembang secara mandiri. Menurut Kartasasmita, pemberdayaan adalah proses membangun kemampuan masyarakat agar mereka dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Kartasasmita, 1996). Pemberdayaan tidak hanya menyangkut peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan budaya yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat mampu mengenali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan eksternal serta mendorong lahirnya inisiatif dan inovasi lokal. Menurut Ife & Frank Tesoriero, tujuan akhir dari pemberdayaan adalah tercapainya keadilan sosial, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam konteks desa, pemberdayaan masyarakat menjadi dasar penting untuk menciptakan desa mandiri yang berdaya secara ekonomi, sosial, dan politik (Tesoriero, 2009).

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan efektif tanpa mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Salah satu prinsip utama adalah *partisipasi aktif masyarakat*, yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan. Menurut Sumodiningrat, partisipasi aktif ini bukan hanya dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan pemikiran

dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif (Gunawan et al., 1999).

Prinsip lainnya adalah *kesetaraan dan keadilan*, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan. Selain itu, pemberdayaan harus dilandasi oleh *prinsip keberlanjutan*, yang menekankan bahwa setiap proses yang dilakukan harus mampu menghasilkan dampak jangka panjang dan tidak bersifat instan. *Kemandirian* juga menjadi prinsip kunci dalam pemberdayaan, yaitu mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada bantuan luar, melainkan membangun kekuatan dari dalam komunitas itu sendiri. Seperti diungkapkan Chambers, pemberdayaan yang berhasil adalah ketika masyarakat mampu membuat keputusan secara mandiri dan bertindak berdasarkan sumber daya yang mereka miliki (Chambers, 1995).

### Program Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri, mengelola potensi dan sumber daya lokal, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Menurut Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi desa mandiri merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi *Indeks Desa Membangun* (IDM), yang mencerminkan keberdayaan desa dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (PDIT, 2021).

Indikator utama dalam pengukuran status desa mandiri berdasarkan IDM terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) ketahanan sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, dan modal sosial masyarakat; (2) ketahanan ekonomi, yang mencakup akses terhadap pasar, kegiatan ekonomi produktif, dan tingkat pendapatan masyarakat; serta (3) ketahanan ekologi/lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan kualitas lingkungan hidup (Kemendesa PDIT, 2021). Ketiga dimensi tersebut diukur melalui serangkaian indikator kuantitatif yang menghasilkan klasifikasi desa dalam lima kategori: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Tujuan utama dari Program Desa Mandiri adalah untuk mendorong desa menjadi wilayah yang memiliki kemandirian secara ekonomi, sosial, dan ekologi, sehingga desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan nasional. Program ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi potensi lokal (Kemendagri, 2020). Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara desa dan kota, serta mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan.

Arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri secara konkret tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan melalui berbagai program prioritas nasional seperti *Program Inovasi Desa, Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)*, dan *Penguatan Perencanaan Partisipatif Desa*. Selain itu, keberadaan Dana Desa sejak tahun 2015 menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah juga mendorong integrasi antara desa dan sektor lain melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan stakeholder guna mempercepat pencapaian status desa mandiri (Bappenas, 2020).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi pemerintah desa

dalam memberdayakan masyarakat melalui implementasi Program Desa Mandiri. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji realitas sosial secara kontekstual, mendalam, dan alami (natural setting), serta memberikan ruang bagi pemaknaan subjektif dari para informan. Menurut Creswell, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus (Creswell, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga sebagai informan kunci untuk menggali strategi-strategi pemberdayaan yang dijalankan pemerintah desa. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pemberdayaan masyarakat yang berlangsung di desa, termasuk kegiatan pelatihan, musyawarah desa, dan pelaksanaan program ekonomi produktif. Sementara dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan desa, laporan

kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk menjamin validitas dan keandalan data yang diperoleh (Miles et al., 2019).

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu agar diperoleh informan yang benar-benar memahami konteks program desa mandiri dan keterlibatan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kedudukan, pengalaman, atau pengetahuan yang relevan dengan masalah penelitian (Sugiono, 2021).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman & Saldana, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2019). Proses ini dilakukan secara simultan sejak data dikumpulkan hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis diinterpretasikan dalam narasi deskriptif yang menjelaskan pola strategi pemberdayaan, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan

penghambat dalam implementasi Program Desa Mandiri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pucangro merupakan bentuk upaya nyata dalam mendorong terciptanya desa mandiri. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyusun berbagai program pemberdayaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kapasitas sumber daya manusia. Beberapa program utama yang dilaksanakan antara lain pelatihan keterampilan kerja bagi ibu rumah tangga dan pemuda, pendampingan pengembangan UMKM, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes. Strategi ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian warga (Pathony, 2019).

Pemerintah Desa Pucangro juga memprioritaskan pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan perencanaan program. Masyarakat dilibatkan secara aktif melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyampaikan usulan, aspirasi, dan kritik. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip

partisipasi sejati sebagaimana dikemukakan oleh Widianingsih, bahwa pemberdayaan yang efektif harus memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan sebagai subjek pembangunan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan diyakini mampu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap keberhasilan program (Widianingsih, 2017).

Selain perencanaan, strategi pelaksanaan program juga dijalankan dengan membangun kemitraan lintas sektor. Pemerintah desa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan lembaga pelatihan kerja. Kolaborasi ini membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis yang tidak dapat disediakan sepenuhnya oleh desa. Ife dan Tesoriero menekankan pentingnya kemitraan dalam pemberdayaan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program yang dijalankan (Ife & Tesoriero, 2006).

Strategi lain yang diimplementasikan adalah penguatan kelembagaan desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa melakukan pendampingan dalam

pengelolaan unit usaha BUMDes agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa. BUMDes di Desa Pucangro telah mengelola unit usaha perdagangan dan simpan pinjam yang hasilnya digunakan kembali untuk kegiatan sosial dan modal usaha warga. Upaya ini menunjukkan adanya sinergi antara pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kelembagaan lokal, yang menurut Sumaryadi, menjadi elemen penting dalam menciptakan kemandirian desa yang berkelanjutan (Sumaryadi, 2005).

Namun, dalam implementasinya, strategi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam manajemen usaha, rendahnya literasi keuangan warga, serta kurangnya inovasi produk dari UMKM lokal. Meski demikian, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kapasitas melalui pelatihan lanjutan dan studi banding ke desa-desa yang telah berhasil. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan di Desa Pucangro dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih perlu diperkuat dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kolaborasi multisektor.

## **2. Dampak Program Desa Mandiri terhadap Masyarakat**

Program Desa Mandiri yang diterapkan di Desa Pucangro menunjukkan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun partisipasi warga dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terjadi peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang ditunjukkan oleh munculnya usaha mikro seperti kerajinan, makanan olahan, hingga jasa. Selain itu, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah desa bersama mitra eksternal telah membantu meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga dan pemuda desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Kuncoro yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan secara partisipatif dan berkelanjutan (Kuncoro, 2018).

Dari sisi sosial, program ini turut memperkuat kohesi sosial masyarakat. Kegiatan gotong royong, pertemuan kelompok, dan pelibatan dalam Musyawarah Desa menjadi media interaksi sosial yang memperkuat solidaritas warga. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pembangunan juga mengalami peningkatan, tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi juga dalam kontribusi ide dan kritik membangun. Menurut Widianingsih, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa menjadi indikator penting bagi keberhasilan pemberdayaan, karena masyarakat bukan lagi objek, melainkan menjadi subjek yang turut menentukan arah kebijakan pembangunan (Widianingsih, 2017).

Selain itu, dampak signifikan lainnya adalah meningkatnya kemandirian dan kapasitas masyarakat. Dengan adanya penguatan kelembagaan desa, seperti BUMDes dan kelompok usaha bersama, masyarakat mulai mampu mengelola program dan kegiatan ekonomi secara mandiri. Pemerintah desa juga menyediakan ruang pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kewirausahaan warga. Dalam perspektif Ife dan Tesoriero, peningkatan kapasitas lokal merupakan fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial secara mandiri (Ife & Tesoriero, 2006).

Secara umum, program Desa Mandiri di Pucangro memperlihatkan bahwa ketika masyarakat diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, maka akan tercipta perubahan yang lebih substantif. Peningkatan kesejahteraan bukan hanya terlihat dari aspek ekonomi semata, melainkan juga dari bertumbuhnya kepercayaan diri, inisiatif, dan solidaritas sosial. Namun demikian, keberhasilan ini memerlukan konsistensi dalam pendampingan, peningkatan literasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor agar dampaknya dapat terus berkembang dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Pucangro adalah tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Desa ini memiliki potensi pertanian yang cukup besar, serta masyarakat dengan keterampilan dasar yang cukup untuk dikembangkan melalui pelatihan seperti pelatihan pembuatan jarring, jala dan songkok. Potensi ini menjadi modal penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi produktif desa. Sejalan dengan pendapat Suharto,

pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki masyarakat itu sendiri sebagai titik tolak perubahan (Suharto, 2009).

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan program Desa Mandiri. Di beberapa kegiatan seperti pelatihan UMKM dan kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur, warga Desa Pucangro menunjukkan antusiasme yang tinggi. Namun, partisipasi ini cenderung bersifat teknis dan belum menyentuh aspek perencanaan dan evaluasi. Menurut Widianingsih, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih sering terbatas pada pelaksanaan program saja, sementara aspek perumusan kebijakan dan pengawasan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi politik lokal dan ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat (Widianingsih, 2017).

Dari sisi regulasi, adanya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa dalam mengatur dan mengelola program pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, pada praktiknya, banyak regulasi

teknis pelaksanaan yang masih belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara konsisten di tingkat desa. Hal ini menyebabkan terjadinya kekakuan dalam pelaksanaan program dan seringkali membuat pemerintah desa lebih memilih pendekatan administratif daripada pendekatan partisipatif. Menurut Effendi, regulasi yang terlalu birokratis dapat menghambat inovasi lokal dan memperlambat proses pemberdayaan (Effendi, 2020).

Budaya lokal masyarakat Desa Pucangro juga memiliki dua sisi yang kontradiktif terhadap pelaksanaan program desa mandiri. Di satu sisi, nilai-nilai seperti gotong royong, saling percaya, dan solidaritas sosial sangat mendukung pelaksanaan program berbasis komunitas. Namun di sisi lain, masih ada budaya pasif dan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang menghambat inisiatif masyarakat untuk berwirausaha atau mengelola usaha secara mandiri. Hal ini selaras dengan pandangan Koentjaraningrat, bahwa budaya lokal dapat berperan sebagai pendorong sekaligus penghambat dalam pembangunan, tergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut

dikonstruksikan dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Keterbatasan kapasitas aparatur desa juga menjadi penghambat yang cukup signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Mereka cenderung bekerja secara administratif dan menunggu arahan dari pemerintah kabupaten atau pihak ketiga. Untuk itu, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar aparatur desa mampu menjadi fasilitator pemberdayaan yang efektif. Menurut Sutoro Eko, keberhasilan desa mandiri sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan lokal dan bagaimana pemimpin desa mampu mendorong partisipasi warga serta memanfaatkan potensi secara kolektif (Eko et al., 2014).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi pemberdayaan masyarakat melalui program desa mandiri sangat bergantung pada sinergi antara sumber daya lokal, regulasi yang adaptif, partisipasi masyarakat yang aktif, serta budaya lokal yang dikelola secara bijak. Desa Pucangro memiliki fondasi sosial yang cukup kuat, namun perlu penguatan dalam aspek manajerial dan pengembangan kapasitas kelembagaan

desa. Dengan pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, pemerintah desa memiliki peluang besar untuk menjadikan masyarakatnya lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Pucangro dalam memberdayakan masyarakat melalui Program Desa Mandiri dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dan produktif.

Dampak dari implementasi program ini terlihat pada beberapa aspek, seperti meningkatnya taraf ekonomi masyarakat, tumbuhnya kesadaran berpartisipasi dalam kegiatan desa, dan berkembangnya budaya gotong royong serta kepedulian sosial. Namun demikian, keberhasilan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya

manusia dan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat di sebagian kelompok, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal secara menyeluruh. Faktor regulasi, koordinasi lintas sektor, dan budaya lokal juga menjadi aspek yang perlu terus diantisipasi dalam proses pemberdayaan desa yang berkelanjutan.

Pemerintah desa perlu terus memperkuat strategi pemberdayaan dengan memperluas akses pelatihan yang sesuai dengan potensi lokal, memperbaiki mekanisme partisipasi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Kolaborasi yang intensif dengan pihak ketiga seperti dinas terkait, perguruan tinggi, dan LSM juga penting untuk memperluas jangkauan serta kualitas program pemberdayaan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian komparatif di beberapa desa dengan karakteristik berbeda guna mengetahui variasi strategi dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pendekatan penelitian mixed methods dapat digunakan agar hasil kajian lebih holistik, baik dari sisi data kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti juga dapat memperdalam aspek budaya lokal dan

dinamika sosial yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program Desa Mandiri.

## Daftar Pustaka

- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Effendi, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam UU Desa. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 17(2).
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., & Aksa, S. (2014). Desa membangun indonesia. *Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Gunawan, S., Muttaqin, Z., Yunita, D., Sutrisno, B., & Lesmana, A. C. (1999). Pemberdayaan masyarakat. *JPS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.

- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.
- Iswandi, T. (2020). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Telaga Baru Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Riau.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Cides.
- Kemendagri. (2020). *Pedoman Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan*. Kemendagri.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marlaba, S. S., & Khaddafi, M. (2024). *IMPLEMENTASI PRAKTIK PENGANGGARAN BERBASIS PARTISIPASI DI INDONESIA*. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 8568–8575.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis [Internet]*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, 1(2), 262–289.
- PDTT, K. (2021). *Panduan Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kementerian Desa.
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat*. Citra Utama.
- Tesoriero, F. (2009). *Community Development-Community Based Alternatives in an Aged of Globalisation*.
- Widianingsih, I. (2017). Partisipasi dalam Pembangunan Desa: Studi tentang Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 24(2), 86–95.

Wulandari, D., & Suryono, A. (2020).

*Strategi Pemberdayaan  
Masyarakat Desa dalam  
Mewujudkan Desa Mandiri.*  
<https://gondoharum.kendalkab.go.id/kabardetail/QWNQTVpJeWtwODUzNXdqeGQ5QmRBUT09/pe>  
mberdayaan-masyarakat-desa--  
kunci-menuju-kemajuan-dan-  
kesejahteraan.html#:~:text=Strat  
egi Pemberdayaan Masyarakat  
Desa,ekonomi dan sosial  
masyarakat desa.

Yustiyanto, R. (2025). Partisipasi  
Masyarakat dalam Pembangunan  
Desa. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi  
Sosial Terapan*, 4(1), 88–95.